

Meneropong “KOMUNIKASI BEBAS PENINDASAN”

Buah Pemikiran Kritis Jurgen Habermas dalam Realitas Wajah Pertelevisian Indonesia

(Dilihat dari Ontologis, Epistemologis, Aksiologis Kajian Media)

Marsefio S.Luhukay

Abstract

Critical Theory that was built by Jurgen Habermas strove to find a methodology to uncover the other way around, namely relatedness between knowledge and human interests as social creatures. Therefore, critical theory of Jurgen Habermas was often called Critical Theory of Ideology; since there was an inevitable correlation between knowledge and social praxis, between knowledge, technology and issues of modern societies such as alienation, technological domination, reification, social repression, dehumanization, depersonalization and various agonies and depression of human beings due to intervention and penetration of knowledge and technology. Such was the case that ideological critics intended to reveal negative intentions disguised by ideology derived from distorted communication models systematically that led to social injustice and suppression.

Keywords: *critical theory, social praxis*

Latar Belakang

Saat ini manusia sedang berada dalam suatu era informasi, dimana segala aspek kehidupan tidak terlepas dengan informasi. Oleh karenanya, informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar dan memiliki posisi yang sangat penting dalam kesinambungan kehidupan manusia. Informasi selalu terkait dalam segala bidang diantaranya ekonomi, sosial, budaya, politik, dan aspek-aspek lainnya dalam hidup manusia.

Melalui sebuah pesawat televisi, semua kejadian dapat disiarkan dalam area yang luas hanya dalam hitungan detik. Televisi sudah masuk dalam kehidupan manusia, dan secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial, pemikiran dan perilaku pendengarnya. Namun sebagai media massa, maka fungsi utamanya adalah sebagai penyampai informasi, sementara itu hiburan merupakan fungsi pelengkap. (Siregar, 2001 : p. 179).

¹ **Marsefio S. Luhukay, S. SoS.,** Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fikom UK Petra Surabaya. Sedang menyelesaikan S2 Komunikasi pada Program Pasca Sarjana Unair Surabaya.

Dalam proses komunikasi sosial, peran ideal komunikasi sebagai media penyiaran publik adalah mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengarnya. Ada tiga bentuk kebutuhan, yaitu informasi, pendidikan dan hiburan. Hal ini sesuai dengan fungsi media massa untuk : (1) menciptakan lapangan kerja, (2) alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat, (3) sebagai wahana pengembangan kebudayaan, nilai-nilai dan norma (4) Sebagai alat untuk menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (McQuail, 2001 : p.3).

Saat ini televisi bukan hanya sekedar media penyampai pesan dari sumber pada komunikannya, tetapi lebih dari itu, televisi juga mempunyai aspek politis didalamnya (Mc Quail, 2001, p. 16). Inilah sebabnya kampanye Pilkada dan kampanye Presiden – Wapres juga berlangsung di televisi. Bahkan untuk kepentingan bisnis yang kuat, fenomena iklan / advertising yang menjamur juga dapat dilihat di wajah televisi kita.

Menurut Peter Herford (dalam Morissan, 2004 : p.2) siaran televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk melalui pendekatan sistem lensa dan suara. Pancaran sinyal ini diterima antena televisi untuk kemudian diubah kembali menjadi gambar dan suara. Untuk menyelenggarakan siaran televisi maka diperlukan tiga komponen yang disebut trilogi televisi yaitu, studio dengan berbagai sarana penunjangnya, pemancar atau transmisi, dan pesawat penerima yaitu televisi. Siaran Televisi pertama di Indonesia dimulai tahun 1962 saat itu TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17, pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962, jam 14.30 wib, yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4, dari Stadion utama Gelora Bung Karno (Morissan, 2005, p.8).

Sejak pemerintah membuka siaran TVRI selama 27 tahun, penonton Televisi Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi saja. Ini menunjukkan bahwa TVRI belum disiapkan secara sempurna, dalam prosesnya kemudian, dipakai oleh Soeharto bukan sebagai media massa, tetapi lembaga penyiaran yang sangat berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaan yang hegemonik. Pada masa Soeharto, TVRI adalah media pemerintah, bukan media massa. Dan karena itu, tidak mengabdikan pada kepentingan masyarakat tetapi pada kepentingan penguasa. Baru pada tahun 1989, pemerintah memberi izin operasi kepada kelompok usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI. Gerakan reformasi di tahun 1998 telah turut memicu perkembangan industri media massa, khususnya televisi. Seiring dengan itu kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Menjelang tahun

2000 hampir serentak lima televisi swasta baru (Metro TV- media group, Trans TV, Lativi dan Global TV) serta beberapa stasiun televisi daerah yang saat ini jumlahnya mencapai puluhan stasiun televisi lokal. Tidak ketinggalan pula munculnya televisi berlangganan seperti HBO, dan Astro TV yang menyajikan informasi dan tayangan dalam dan luar negeri.

Televisi saat ini telah menjadi media keluarga. Telah menjadi salah satu prasyarat yang “harus” berada ditengah-tengah mereka. Sebuah rumah, baru dikatakan lengkap, jika ada televisi didalamnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada masyarakat kota yang relatif lebih maju dan kaya, tetapi telah merambah ke pelosok-pelosok desa, dirumah-rumah hunian liar, dipinggir-pinggir sungai kota ataupun dibawah jembatan layang (Wirodono, 2005, p.viii). pendek kata, televisi telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai primadona media, televisi memberikan imbas yang luar biasa besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan kehadirannya yang masif, dengan bau kapitalistiknya yang kental, langsung tidak langsung berpengaruh pada perilaku dan pola pikir masyarakat Indonesia. Apalagi dalam deretan media informasi, media ini memiliki daya penetrasi jauh lebih besar daripada media lainnya.

Pemikiran Kritis JURGEN HABERMAS



Lahir June 18, 1929 di Düsseldorf, Germany

Filsuf Jerman yang beraliran Kritis (Critical theory)

Ketertarikan utamanya : Social theory, Epistemology, Political theory, Pragmatics

Pemikirannya yang terkenal : Communicative rationality, Discourse ethics, Deliberative democracy, Universal pragmatics

Habermas dipengaruhi oleh tokoh-tokoh / filsuf lainnya yang banyak menginspirasi tulisan-tulisan / pemikirannya antara lain : Immanuel Kant, Karl Marx, Martin Heidegger, Theodor Adorno, Herbert Marcuse Habermas adalah salah seorang tokoh pemikir mazhab Frankfurt. Habermas dipandang sebagai tokoh yang paling banyak berkarya dan paling berpengaruh dalam generasi kedua mazhab Frankfurt. Dia tidak hanya melanjutkan tradisi gurunya Adorno dan Horkheimer serta rekannya Marcuse, melainkan juga secara signifikan memisahkan diri dari teori kritis yang klasik dan dia dianggap sebagai seorang pemikir yang memberi sumbangan yang besar pada filsafat dan teori sosial. Gagasan-gagasannya tentang tindak dan rasionalisasi komunikatif serta ruang publik telah memperkaya analisis teori sosial mutakhir dalam menjelaskan fenomena budaya dan politik masyarakat kontemporer. Teori kritis mempunyai epistemologi yang lain. Dia mengatakan kita tidak bisa mengetahui sesuatu kalau tidak menyadari kepentingan kita. Tidak mungkin kontemplasi tanpa kepentingan. Kontemplasi mempunyai kepentingan. Tetapi untuk mencapai "objektivitas" ia tidak mau mengatakan ini namun inilah yang disebut keilmiahan, nyatakanlah sejujurnya kepentingan itu bahkan capailah kepentingan itu lewat konstruksi teoritisnya. Nah kepentingan dalam riset sosial adalah kepentingan praksis untuk membebaskan masyarakat dari penindasan, ketidakadilan dan sebagainya. Sedangkan kepentingan dalam ilmu-ilmu alam, walaupun objektif ada kepentingannya yaitu menaklukkan.

Komunikasi Bebas Penindasan dan Ruang Publik

Tulisan-tulisan generasi pertama teoritis kritis, seperti Horkheimer, Adorno, Lowenthal dan Marcus, emnawarkan basis untuk emlakukan telaah intensif atas kritik masyarakat modern, termasuk diskusi tentang konsekuensi-konsekuensi filosofis (dan politisnya) bagi penelitian komunikasi (massa). Karya mereka lalu diperkaya oleh Jurgen Habermas (1981) yang menawarkan justifikasi epistemologis bagi emansipasi manusia. Bahkan mengambil posisi kritis ketimbang sekedar teori, membuat teori kritis dimulai dnegan kritik atas kondisi masa kini dan lantas diarahkan pada potensi masa depan. Bagi Habermas, tindakan tersebut melibatkan kepentingan emansipatoris dengan potensialitas umat manusia di pusatnya.

Secara khusus Habermas mengkonstruksi konsep tindak komunikatif dari tiga "topik kompleks yang saling terkait". Rasionalitas komunikatif yang terbebas dari keterbatasan-keterbatasan pendekatan teori sosial individualistik, konsep dua level yakni paradigma yang "menghubungkan dunia kehidupan (*lifeworld*) dan sistem", dan teori modernitas yang memperhitungkan "patologi-patologi sosial". Dia menambahkan bahwa "teori tindak komunikatif" dimaksudkan untuk memungkinkan adanya

konseptualisasi konteks kehidupan sosial yang disesuaikan dengan paradoks-paradoks modernitas (1984 3a: xl).

Rute menuju posisi teoritis seperti itu membawa pada penerapan suatu ilmu pengetahuan rekonstruktif (*reconstructive science*). Dalam *Communication and the Evaluation of the Society* (1979) Habermas sudah menekankan pentingnya pemahaman dan menegaskan bahwa "tugas pragmatik universal adalah untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi kondisi-kondisi universal yang memungkinkan pemahaman (*verständnis*)", yang sampai pada "presuposisi umum tindak komunikatif" sebab ia mempertimbangkan "jenis tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai pemahaman itu menjadi fundamental" (1979 : 1). Bahkan bagi Habermas, pemahaman berarti mencapai kesepakatan yang berakhir pada mutualitas dan intersubjektivitas. "Berbagi pengetahuan, saling percaya, dan cocok satu sama lain". Kesepakatan seperti itu didasarkan pada "pengakuan atas klaim-klaim kebenaran tentang komprehensibilitas, benar (*truth*), kebenaran (*truthfulness*) dan ketepatan (*rightness*) yang saling berhubungan" (1979 : 3).

Kondisi yang mendasari praktik komunikatif seperti itu didasari rasionalitas yang ditentukan oleh apakah para partisipannya "bisa, dalam kondisi nyaman, untuk memberi penalaran atas ekspresi-ekspresinya". Habermas menjelaskan bahwa "rasionalitas yang tepat untuk praktik komunikatif dalam praktek kehidupan sehari-hari menunjuk pada praktik argumentasi seperti sidang banding dipengadilan" yang akan memungkinkan berlanjutnya tindak komunikatif dibawah kondisi yang tak akan memungkinkan untuk "memperbaiki" ketidaksepakatan melalui "rutinitas keseharian" atau "penggunaan kekuatan" (1984a : 17 – 18).

Menurut Habermas, konteks budaya para partisipan dalam komunikasi terdiri atas dunia objektif, sosial, dan subjektif dari sang aktor, yang merepresentasikan totalitas "dari semua entitas yang memungkinkan adanya pernyataan yang sesungguhnya", "dari pengalaman sang pembicara yang hanya bisa diakses dirinya" (1984a: 100).

Dibawah kondisi tersebut, komunikasi menjadi proses negosiasi terhadap latar belakang budaya bersama, atau "dunia kehidupan" yang menawarkan presuposisi kondisi untuk setiap partisipasi yang bermakna. Bahkan budaya, masyarakat, dan individu merupakan komponen struktural dari "dunia kehidupan" yang didalamnya tindak komunikatif digunakan untuk mereproduksi pengetahuan budaya, untuk mengintegrasikan individu dan untuk membentuk kepribadian. Habermas melihat budaya sebagai reservoir pengetahuan, yang dari dalamnya partisipan dalam berkomunikasi mengenai dunia mengambil interpretasinya; masyarakat merepresentasikan tatanan yang absah, yang melalui tatanan itu para partisipan menjamin

anggotanya dalam kelompok sosial dan meneguhkan solidaritasnya; dan kepribadian mengacu pada kompetensi-kompetensi yang memungkinkan seorang subjek berpartisipasi dalam proses pemahaman sembari menjaga identitasnya sendiri. Bidang semantik dari kandungan simbolik, ruang sosial dan waktu sejarah, membentuk dimensi-dimensi tempat tindak komunikasi berlangsung. (1984b : 594 – 5).

Media sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari dalam "dunia kehidupan" berfungsi sebagai bentuk-bentuk komunikasi yang umum. Jadi, pers, radio, dan televisi misalnya memiliki fungsi yang mungkin. Media adalah partisipan yang bebas dari keterbatasan ruang dan waktu (*spatial – temporal*) mereka, menyediakan berbagai konteks, dan menciptakan instrumen dalam penciptaan ruang publik (publik sphere) yang mampu melayani kepentingan-kepentingan otoriter atau emansipatoris. (1984a : 406).

Perspektif tentang komunikasi dan media seperti diatas menunjukkan bahwa teori dan penelitian komunikasi (massa) mestilah terkait dengan analisis praktik-praktik komunikatif, yakni yang berkaitan dengan isu-isu mengenai kompetensi komunikatif, pemahaman, dan partisipasi para individu dalam dunia kehidupan mereka. Bagi Habermas, (seperti yang diamati oleh Daniel Hallin, 1985 : 142), "semua bentuk komunikasi insani, meski dibawah kondisi penyebaran massa sekalipun, pada hakikatnya merupakan relasi diantara subjek-subjek manusia, yang terutama bersumber dari struktur elementer dialog".

Wajah Pertelevisian Indonesia saat ini

Stasiun televisi Indonesia setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya beragam. Idealnya, apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan televisi selama program itu menarik dan disukai audiens, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Program televisi dapat dibagi atas dua bagian yang besar berdasarkan jenisnya yaitu (1) program informasi (berita / *news*) dan (2) Program hiburan (*entertainment*). Seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan bahwa daya penetrasi televisi adalah terbesar dibanding medi amassa lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika banyak tuduhan yang diarahkan pada media televisi sebagai penyebab maraknya gaya hidup konsumeristik- hedonistik.

Pada awal tahun 2000 muncul program reality show yang menjadi trend di Indonesia. Sesuai dengan namanya program ini mencoba menyajikan sesuatu situasi konflik persaingan atau hubungan berdasarkan realitas sebenarnya (Morissan, 2005 , p.106). Ada berbagai bentuk reality show seperti Hidden Camera yang merupakan program realistik dimana kamera ditempatkan secara tersembunyi yang mengamati- amati gerakan

subjek, contohnya Spontan (SCTV), Harap-harap Cemas (RCTI), dan sebagainya. Program reality show lain yang meniru ala Amerika adalah Indonesian Idol, kemudian ada juga Akademi Fantasia Indosiar (AFI) yang sempat melejit diawal tetapi kemudian sejalan dengan waktu menjadi mundur dan hampir tidak ada gregetnya lagi. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari acara ini adalah bagaimana “nasib” anak-anak muda yang menjadi pemenang, yang di orbitkan lewat AFI ini dan mereka seolah dikarbit, tidak melalui proses asam garam kehidupan tetapi hanya melalui 1 jalan yakni AFI ini mereka sudah “layak disebut bintang”. Tetapi setelah itu bagaimana kelanjutan perjalanan karir mereka ? Tayangan untuk anak pun tidak lepas dari pengaruh yang ada.

Analisis realitas wajah pertelevisian Indonesia dengan pemikiran kritis Habermas “Komunikasi Bebas Penindasan”

Sebagai media, tentu saja televisi bersifat netral. Namun, karena ia dikelola dan digerakkan oleh subjek-subjek, subjektifikasi para pengelola televisi akan menjadi warna yang dominan, yang menentukan arah dan peran serta televisi. Besarnya investasi untuk sebuah stasiun televisi akan membuat pengelola televisi melakukan perhitungan-perhitungan untuk mengembalikan nilai modal tadi ke titik nol, dan kemudian meraih keuntungan finansial. Distribusi atau sirkulasi keuangan nasional yang berpusat di ibu kota Jakarta, secara tidak langsung juga memberikan berbagai akibat. Yakni memposisikan stasiun-stasiun televisi yang ada di Jakarta, sebagaimana peraturan perundangan sebelumnya, sebagai televisi nasional yang dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Sementara watak dan perilaku televisi-televisi itu, dengan berbagai keterbatasannya (keuangan, kreativitas, dan posisi) membuat media televisi melakukan penyempitan Indonesia menjadi semata Jakarta saja.

Dan persepsi dan perspektif Jakarta ini lah yang membuat media televisi tidak mampu merekam Indonesia secara maksimal, dalam pengertian adil dan merata. Pada posisi inilah stasiun televisi dikhawatirkan menjadi penganjur dan penyebab munculnya keseragaman dan kebudayaan Indonesia. Pluralitas dan heterogenitas budaya bangsa diabaikan. Indonesia yang heterogen dengan ribuan suku dan bahasa, adat, kebudayaan, dilibas oleh keterbatasan modal dan keterbatasan wilayah. Munculnya UU Penyiaran no. 32/2002 tentang penyiaran, meski mencoba menata dan mengkritisi penyiaran televisi Jakarta yang tersentral, tidak dengan sendirinya mengubah peta persoalan.

Terbiasa dengan iklim berbisnis tanpa aturan (ataupun jika ada aturan bisa di terobos), para pengelola televisi menjadi resisten terhadap hal ini. Bahkan para pengelola dan investor televisi Jakarta melakukan

perlawanan untuk menggagalkan UU no 32/2002. Demikian pula munculnya televisi lokal di beberapa daerah sebagai akibat adanya regulasi ini tidak pula berada dalam harapan yang sebanding karena stasiun televisi ini pun sam adan sebangun. Stasiun-stasiun televisi lokal pun tidak berangkat dari sebuah proses yang terjadi dalam masyarakatnya.

Ada berbagai permasalahan serius yang berkenan dengan media televisi Indonesia. Apalagi jika diketahui bahwa media televisi lebih banyak diserap oleh masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat pada kelompok ini adalah masyarakat yang cenderung tidak kritis atau terbatas akses bandingannya. Kecenderungan menerima dalam konteks percaya pada kebenaran informasi yang diserapnya atau apatis dalam menyikapi semua kenyataan yang ada disekitarnya dominan pada masyarakat kelompok ini.

Pada kelompok masyarakat ini pula, sebuah stasiun televisi yang dibangun dengan rasa tanggungjawab yang nihil sekalipun akan tetap tumbuh. Bahkan semakin tidak bertanggungjawab sebuah stasiun televisi, barangkali semakin berkembanglah stasiun tersebut. Caranya dengan mengeksploitasi semua keinginan masyarakat penontonnya. Sehingga media televisi hanya menjadi pelayan yang menina bobokan, tetapi tidak mempunyai daya untuk membangun masyarakat yang beradab. Media televisi Jakarta, secara seragam dan pasti, mengubah wajah kebudayaan Indonesia menjadi seragam. Sayangnya, kebudayaan yang seragam itu tidak dipimpin oleh munculnya spirit gagasan baru tentang "Kebangsaan Indonesia", melainkan oleh kekuatan kapitalisme global. Kekuatan ini secara induktif melakukan proses "*the learning social norms*" secara masif dan akumulatif.

Yang menonjol dalam hal ini adalah munculnya pragmatisme dan individualisme. Nilai-nilai kesakralan dan sosial kemasyarakatan, sebagaimana nilai agama yang transenden, mulai terpinggirkan oleh hal-hal yang superfisial, dangkal, semu, formal, serta mementahkan aspek argumentasi. Lalu bagaimana dengan kapitalisme ?

Sebuah istilah, apalagi digunakan oleh lembaga-lembaga resmi dunia, bahkan lembaga politik, tentu bukan sembarang istilah. Globalisasi atau neoliberalisme tak cukup dipahami sebagai neo-imperialisme. Globalisasi juga sebagai proses alamiah transformasi kehidupan manusia. Kaum kapitalis maupun proletar sama-sama problematis menghadapi situasi ini.

Memang tidak salah pandangan klasik konflik majikan dan buruh sebagai konsekuensi logis dari sistem kapitalisme. Yang salah adalah memandang konflik tersebut sebagai sesuatu yang baku, sementara realitas sudah berubah. Konsekuensinya, cara pandang pun harus berubah untuk menentukan tindakan yang tepat.

Zaman telah berubah. Pola hubungan di masyarakat sangat bervariasi. Sebelum teknologi berkembang, umat manusia berharap teknologi mutakhir seperti eksistensi, otomatisasi, standarisasi, mekanisasi akan membebaskan manusia dari kerja fisik. Manusia akan terbebas dari penindasan antar manusia. Tetapi dalam kenyataannya realitas zaman serba hi-tech justru banyak mengatur, bahkan mendominasi manusia. Teknologi, memaksakan tuntutan ekonomis dan politiknya kepada manusia.

Filsuf Herbert Marcuse berpendapat, "jika dahulu, dalam era kapitalisme liberal mayoritas (buruh) ditindas oleh minoritas (majikan), kini di era neo-liberal mayoritas ditindas oleh sesuatu yang sifatnya anonim, yaitu sistem teknologi". Marcuse punya istilah yang menarik dalam melihat karakter jaman ini dengan menyebutnya rasionalitas teknologis. Jangankan dalam tata-kelola ekonomi, dalam hal kebudayaan pun bisa dipandang rasional sejauh bisa diperalat, dimanipulasi, dimanfaatkan atau diperhitungkan secara matematis dan ekonomis.

Jürgen Habermas, sang penafsir Marxisme, menemukan satu teori yang sangat bagus sebagai paradigma melihat situasi sekarang. Ia berhasil melepas pandangan kritis ala Marxian - yang menurutnya sebagian sudah tidak relevan untuk menyikapi situasi modernitas sekarang. Habermas meluncurkan sebuah pandangan masyarakat '**komunikasi bebas penguasaan**'. Ini adalah kritik kepada pemikiran Marx yang dulu terkenal dengan masyarakat tanpa kelas.

Bedanya, kalau Marx mengandaikan masyarakat tanpa kelas melalui perjuangan kelas, revolusi, Habermas mencanangkan sebuah cara melalui cara berkomunikasi. Sebuah komunikasi yang tidak terdistorsi secara ideologis bagi masyarakat. Secara umum tujuan teori ini bisa digunakan sarana komunikatif antar lapisan kelas sosial masyarakat. Secara khusus bisa digunakan untuk mencapai konsensus dari persetujuan antara publik penonton dengan stasiun televisi.

Tentu semangat Habermas ini cukup menyegarkan kita yang kini hidup dalam era demokratisasi dan liberalisasi. Melalui komunikasi yang baik, satu pihak memahami pihak lain, semua akan memiliki kesempatan yang setara melibatkan diri dalam perbincangan dan mengemukakan persetujuan, penolakan dan penafsiran fakta. Bahkan dengan cara komunikasi itu pula mereka bisa mengungkapkan perasaan dan sikap secara bebas terbuka tanpa pembatasan diri.

Di sini diharapkan, antara masyarakat dan pemilik media (stasiun televisi) bisa melihat kenyataan makro seperti globalisasi, teknologi dan realitas pasar melalui 'sudut yang sama' untuk mencapai kesepakatan yang sama. Dampak positif lain dari pola komunikasi semacam ini juga memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk paham dan sadar akan

perbedaan bahasa kehidupan. Pengertian, transparansi sudah menjadi hal yang wajar di era sekarang. Sebab keuntungan perusahaan sekarang tidak mungkin berhasil jika sekadar mengandalkan "kecerdasan" pemilik modal dalam mengeskplotasi stasiun televisinya. Berhasil atau tidaknya sebuah stasiun televisi sangat bergantung kepada pasar. Kompetisi produk unggul dan pelayanan yang baik adalah kata kunci yang harus dipegang setiap pemilik modal.

Sampai saat ini belum dirasakan komunikasi yang betul-betul bebas penindasan / penguasaan dalam wajah media televisi kita. Yang terjadi adalah penonton sebagai objek. Program / tayangan yang dibuat bukan berdasarkan pada realitas sesungguhnya dalam masyarakat Indonesia yang multi kultur ini, (padahal dalam pandangan Habermas komunikasi berlangsung dalam kultur / budaya), tetapi yang terjadi wajah media televisi kita masih berkiblat pada kepentingan pemilik modal., **sehingga dapat dirasakan media televisi kita tidak sesungguhnya bebas dari penguasaan.** Apalagi sampai saat ini campur tangan pemerintah juga belum terlepas dari media televisi. Ada regulasi pemerintah, ada kepentingan kapitalis – yang selalu melihat pasar (pemodal/pemilik media/pelaku media, pemasang iklan/perusahaan –perusahaan besar), dan ada masyarakat (*society*). Ketiga hal ini tidak bisa terlepas satu sama lain, sementara itu media menjadi *uncontrolled* atau tidak terkontrol. Sehingga komunikasi menjadi tidak bebas penindasan. Secara fisik penonton tidak ditindas secara langsung oleh media televisi, tetapi secara psikis iya. Mengapa saya menyebutkan iya, karena penetrasi media televisi yang sangat kuat dengan acara / program tayangan yang tidak mendidik telah membuat masyarakat menjadi semakin terpuruk. Sebaik apapun pengelolaan media, jika tanpa tanggungjawab sosial pada masyarakat penontonnya akan menjadi sia-sia belaka. Dan yang selalu dirugikan adalah pemirsa media televisi yang rata-rata belum melek media (*media literacy*). Dalam masyarakat non literacy, media televisi adalah rujukan, sumber referensi bahkan sumber nilai. Padahal dalam media televisi Indonesia telah terjadi berbagai pendangkalan dalam nilai-nilai kehidupan, yang pada akhirnya akan membuat tatanan sosial masyarakat pun mengalami perubahan. Nilai-nilai dan norma-norma, mengalami pergeseran secara cepat dan belum tentu mendapat antisipasi secara tepat. Karena itu menurut pendapat saya, regulasi masih sangat perlu di negara kita, bukan untuk membatasi isi (content), melainkan menata sistem supaya ada keadilan, mengingat televisi berpraktik dalam ranah publik. Tujuannya untuk melindungi hak-hak publik karena efek mediasi yang luar biasa atas media massa tersebut. Demokrasi memberi tempat yang luas pada kebebasan dan mekanisme pasar agar muncul yang terbaik. Namun demokrasi juga menjunjung tinggi regulasi untuk menjamin terciptanya keadilan. Tanpa

regulasi, keadilan akan mudah dimanipulasi oleh kelompok kekuatan tertentu, yang mempunyai kekuasaan dan kapital.

Secara ideologis, pengaturan dan pengawasan juga masih diperlukan karena aspek kepentingan yang berada dibalik penyelenggaraan kepenyiaran itu (yang notabene menggunakan ranah publik). Pada sisi ini, sangat dimungkinkan terjadi pertentangan ideologi kepentingan antara negara dan pengelola media, yakni atas nama ideologi eksploitasi dan ideologi eksplorasi. Mengingat para pengelola media yang berangkat dari modal besar, memiliki kepentingan bukan saja untuk mengembalikan modal, tetapi juga meraup keuntungan. Padahal dalam perspektif Habermas, Tindak komunikatif (*communicative action*) berperan untuk memfasilitasi transmisi dan pembaharuan pengetahuan budaya, integrasi sosial, dan solidaritas kelompok serta identifikasi personal. Hal-hal ini belum terlihat dalam media televisi kita.

Tatanan global adalah realitas. Kenyataan yang harus dipahami secara baik untuk menentukan tindakan yang tepat. Eksploitasi program acara dengan dalih memuaskan selera masyarakat, atau dalih lebih spesifik "begitulah selera rakyat", mengakibatkan media massa telah gagal mengambil perannya yang strategis sebagai media kebudayaan masyarakat. Habermas mengusulkan bahwa studi tentang media haruslah menjadi studi tentang budaya (kultur), tentang kondisi dunia – kehidupan, dan bahkan tentang prospek ruang publik yang mengabdikan untuk kepentingan emansipatoris. Untuk tujuan tersebut studi media harus didasarkan pada perspektif pengetahuan yang memiliki komitmen pada keterbukaan (kebenaran) dan pada proses refleksi diri. **Apa pengertian kepentingan emansipatoris yang disebutkan oleh Habermas ini ?** Menurut Richard Bernstein, ia menegaskan bahwa "kepentingan emansipatoris" adalah dasarnya, dalam artian kepentingan akal budi yang selanjutnya menjadi kondisi bagi perkembangannya yang utuh; kebutuhan akan komunikasi yang tak terdistorsi menjadi sepenuhnya eksplisit". Media televisi yang berpraktik dalam ruang / ranah publik (*public sphere*), belum sepenuhnya menjalankan regulasinya dengan baik. Aturan-aturan penyiaran belum sepenuhnya dipatuhi dengan baik. Iklan yang masih semrawut pengaturannya dan penayangan program yang "bermasalah" seperti *smack down* (syukurlah telah dihentikan, tetapi sampai kapan?) alih-alih menjadi permasalahan yang akan terus bergulir, selama ruang publik dimasuki dengan kepentingan-kepentingan sekelompok orang yang pada akhirnya menjadikan publik itu juga sebagai objek dari permainan tangan-tangan subjek-subjek tadi dalam bentuk tayangan suatu program televisi.

Pembahasan dalam perspektif Epistemologis, Aksiologis dan Ontologis Studi Media

Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan. Teori kritis mempunyai **Epistemologi** yang lain. Dia mengatakan kita tidak bisa mengetahui sesuatu kalau tidak menyadari kepentingan kita. Tidak mungkin kontemplasi tanpa kepentingan. Kontemplasi mempunyai kepentingan. Tetapi untuk mencapai "objektivitas" ia tidak mau mengatakan ini namun inilah yang disebut keilmiahan, nyatakanlah sejujurnya kepentingan itu bahkan capailah kepentingan itu lewat konstruksi teoritisnya. Nah kepentingan dalam riset sosial adalah kepentingan praksis untuk membebaskan masyarakat dari penindasan, ketidakadilan dan sebagainya.

Berbicara tentang **Axiologis** berarti berbicara tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatnya. Bagi Habermas, secara Aksiologis, semua ilmu tidak bebas nilai. Semua ilmu punya implikasi ideologis / kepentingan-kepentingan tersembunyi. Bagi Habermas, Ilmu pengetahuan tidak lahir dari ruang hampa, tetapi lahir dari kepentingan-kepentingan praksis manusia. Orang menciptakan ilmu pengetahuan pasti ada kepentingannya.

Bagi Kajian Media dan komunikasi, selalu ada konflik kepentingan atau konflik nilai dibalik pemaknaan suatu teks. Pemaknaan sebenarnya adalah milik individu yang memaknai anda / simbol-simbol tersebut. Sehingga baik dari sisi pembuat tanda maupun yang memaknai dapat melihatnya dalam perspektif yang berbeda. Interaksi antara keduanya selalu terjadi dalam ruang publik (*public sphere*) ini yang terjadi sehingga dari segi media televisi dan penonton selalu terjadi "konflik kepentingan" yang melatarbelakangi pemaknaan suatu teks / wacana dalam media. Sehingga kajian media menarik untuk dilakukan.

Membahas tentang apa yang ingin diketahui atau suatu kajian tentang apa yang ada itu. Dasar **Ontologi** dari ilmu adalah yang berhubungan dengan materi yang menjadi objek telaah ilmu. Objek ini bersifat empiris, karena dalam jangkauan pengalaman manusia yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan yang dapat diamati dan diuji olehpanca indra manusia. Ontologis dalam Kajian Media adalah Teks (gambar, simbol, tayangan / program TV, cerita / narasi, wacana). Walaupun demikian, kita sebagai peneliti tetap dapat meneliti dan terus mengkritik media massa. Akan tetapi, bila kita memanfaatkan pendekatan ontologis dan normatif dalam analisis media, maka posisi ilmu komunikasi atau sosiologi pada umumnya akan berada dalam posisi yang lemah. Kita perlu melihat media massa sebagai bagian dari masyarakat kita. Jangan kita bertanya

seberapa parah pemberitaan di media massa kita masa kini. Melainkan juga bertanya, faktor-faktor apa yang memungkinkan penampakan media yang kurang memuaskan.

Jadi pada intinya, gagasan Habermas ini mengatakan bahwa terdapat hubungan strategis antara pengetahuan manusia (baik empiris – analitik, historis – hermeunetik, mapupun kritis) dengan kepentingan (teknis, praktis, atau yang bersifat emansipatoris), jadi ada interaksi yang terjadi yang disebut dengan *communicative action*. walaupun tidak dapat disangkal bahwa yang terjadi bisa juga sebaliknya bahwa pengetahuan adalah produk kepentingan.

Kesimpulan

Oleh karena sifat tekno kapitalisnya, media televisi diharuskan serba cepat, serba lain, dan serba baru. Karenanya tidak ada kesempatan untuk melakukan riset terlebih dahulu, sehingga hampir semua stasiun televisi kita memiliki acara yang seragam yang bercorak Jakarta dan cenderung meniadakan acara-acara lingkungan hidup (wisata kuliner, bukan acara lingkungan hidup – ada kepentingan pebisnis juga didalamnya) dan kebudayaan (Yang ada hanya ludruk atau wayang yang notabene budaya Jawa, budaya lain hampir tidak pernah dimunculkan). Karena itu perlu penataan lagi acara televisi kita. Pemilik modal/pemilik stasiun TV, pengusaha pemasang iklan, Komisi penyiaran Indonesia (KPI) dan wakil masyarakat seperti LSM dan sebagainya bersama dengan DPR perlu duduk bersama membicarakan hal ini. Sebelumnya perlu ada pengumpulan pendapat umum yang besar-besaran melalui media massa di setiap propinsi agar mendapat masukan dari masyarakat mengenai content / isi media televisi kita.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan, 2006. *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media
Hardt, Hanno, 2005. *Critical Communication Studies*, Yogyakarta : Jalasutra
Suseno, Franz Magnis, 2006. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta : Kanisius
Tim Dosen Filsafat Ilmu, 2003. *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta : Liberty
Wirodono, Sunardian, 2005. *Matikan TV-mu !* : Yogyakarta : Resist Book

Non Buku :

- Catatan Kuliah S2 Filsafat Ilmu dari Drs. Eddy Herry, M.Si
Catatan Kuliah S2 Sosiologi Media dari DR. Musta'in Mashud